

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan Susenas 2014 dan 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 254,9 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia setelah China (RRC), India, dan Amerika Serikat. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sehingga di proyeksikan penduduk Indonesia berjumlah 255 juta jiwa hingga mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Dilihat dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah besar antara lain, (1) Persebaran penduduk tidak merata, (2) Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar, (3) Angkatan kerja yang sangat besar, (4) Distribusi kegiatan ekonomi masih belum merata (5) Pembangunan infrastruktur masih tertinggal, (6) Indeks kesehatan masih rendah.

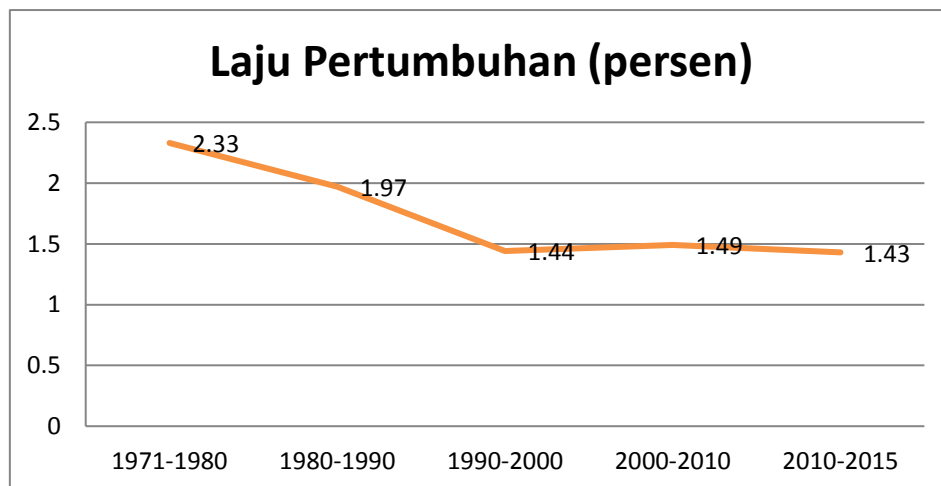
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dimbangi dengan persebaran yang merata sehingga kepadatan penduduk hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu. Menurut SUPAS (2015) mengenai migrasi risen dengan sampel rumah tangga sebanyak 652.000. Jumlah migrasi risen selama 2010 sampai 2015 tertinggi di lima kota yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Medan, Kota Surabaya, Kota Denpasar, dan Kota Makassar. Dimana jumlah migrasi masuk ke kota yang memiliki arus tertinggi DKI Jakarta mencapai 491 ribu jiwa. Dari semua itu, arus migrasi masuk ke DKI Jakarta terbanyak berasal dari Jawa Tengah sebanyak 30,9 persen, kemudian dari Jawa Barat

sebanyak 29,3 persen, Banten 13,6 persen, Jawa Timur 7,9 persen, dan dari Lampung sebanyak 4,2 persen

Menurut Saleh (2015) motif bermigrasi ini dapat dilandasi oleh berbagai alasan, diantaranya keterpaksaan (*forced*), keterpengaruhannya (*induced*), dan atau kemandirian (*spontaneous*) yang mendorong keluar dari ruang asal dan tertatik masuk ke ruang tujuannya. Pergerakan horizontal dari dimensi waktu terbagi atas pergerakan secara ulang alik (*commuting*), musiman (*temporary*), dan menetap (*permanent*). Keputusan untuk melakukan cara pergerakan dengan berbagai motif yang melatar belakangi tersebut, antara lain sangat tergantung pada ketersediaan sistem informasi, komunikasi, dan transportasi serta kelengkapan pelayanan publik dimasing-masing ruang dan antar ruang, dan daya jangkau yang bersangkutan terhadap sistem dan pelayanan yang tersedia.

Di dalam literatur demografi sosial yang sering dikenal dengan studi kependudukan (*population studies*), disebutkan bahwa perubahan jumlah, komposisi, distribusi, dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah (negara, propinsi, kabupaten), menurut Bogue dipengaruhi oleh sedikitnya lima komponen demografi, yaitu; (1) fertilitas atau kelahiran, (2) mortalitas atau kematian, (3) perpindahan penduduk atau migrasi, (4) mobilitas sosial, dan (5) perkawinan. Kelima komponen demografi tersebut baik secara parsial maupun secara simultan baik langsung maupun tidak langsung berperan dalam mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah.

Indonesia mengalami pergeseran laju pertumbuhan penduduk disetiap periodenya. Dari gambar 1.1 pada tahun 1971 sampai 2015 menunjukkan adanya tren yang menurun.



Sumber: Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan SUPAS 2015.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Pada periode tahun 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 2,33 persen. Pada periode tahun berikutnya turun sebesar 0,33 persen menjadi 1,98 persen. Hal tersebut terjadi karena diterapkannya program keluarga berencana (KB) oleh pemerintah pada tahun 1980an. Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Namun pada periode sepuluh tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000-2010 laju pertumbuhan ini mengalami sedikit peningkatan sekitar 0,05 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015) laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi

1,43 persen. Laju pertumbuhan penduduk apabila tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk.

Menurut BPS, migrasi internal dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Migrasi seumur hidup merupakan keadaan perpindahan seseorang yang terjadi sejak lama dari tempat lahir yang berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Migrasi risen merupakan keadaan perpindahan seseorang lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal saat dilakukan pencacahan. Migrasi risen terdiri atas migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi neto. Migrasi masuk merupakan migran yang masuk ke daerah tujuan. Migrasi keluar merupakan migran yang keluar dari daerah tempat tinggal. Migrasi neto adalah selisih dari jumlah migrasi masuk dikurangi jumlah migrasi keluar. Pengaruh perubahan dan pergeseran jumlah penduduk akan berdampak pada proses pembangunan negara.

Pengelolaan jumlah penduduk sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan wilayah di desa dan di kota. Pemahaman terhadap konsep pembangunan desa-kota harus berbasis masyarakat (*People Centered Development*), pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), dan pendekatan penghidupan (*Sustainable Livelihood Approach*). Dalam memahami konsep *People Centered Development* (UNDP, 2010/2011), aplikasi teori ini terletak pada inklusivitas serta pendekatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat.

Sustainable Development didasarkan atas tiga pilar yang satu sama lain saling terkait, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta dengan memperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan buatan sosial dan daya tampung alam. Pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach*) mengasumsikan bahwa kehidupan masyarakat mempunyai banyak tujuan (*multiple objectives*), tidak hanya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi tetapi juga meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi kerentanan dan resiko (Saleh,2015:40).

Migrasi menjadi fokus pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pembangunan negara. Hal tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 33 ayat 3 Pemerintah menetapkan pengarahannya kebijakan mobilitas penduduk internal yang meliputi :

- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan nonpermanen.
- b. Pengarahan mobilitas penduduk dan persebaran penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar provinsi.
- c. Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah.
- d. Pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi)
- e. Penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara dan daerah tertinggal serta pulau pulau kecil terluar.

Migrasi timbul karena perbedaan ekonomi dan mengalir dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan kesempatan ekonomi yang lebih besar, seperti lebih banyak pekerjaan tersedia dan pendapatan/upah lebih tinggi. Namun seiring pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia (2016) menengarai bahwa ketimpangan di Indonesia semakin melebar yang disebabkan oleh salah satunya karena pekerjaan yang tidak merata. Permintaan pekerja terampil dengan upah tinggi di perkotaan meningkat, sedangkan sebagian besar pekerja tidak memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan dan hanya tertampung dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Faktor pekerjaan yang tidak merata menjadikan ketimpangan upah meningkat.

Persebaran penduduk yang tidak merata terjadi karena adanya ketimpangan khususnya dalam distribusi pendapatan. Orang akan cenderung mencari kehidupan yang lebih baik dengan berpindah menuju daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya. Mantra (1992) juga menjelaskan bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerahnya (pedesaan) ke perkotaan adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kondisi yang paling dirasakan menjadi pertimbangan rasional, dimana individu melakukan mobilitas ke kota adalah adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa.

Tabel 1.1.
Lima Provinsi dengan Populasi Tertinggi (juta jiwa)

| Propinsi | Populasi Tahun 2000 | Populasi Tahun 2010 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Jawa Barat | 35.8 | 43.1 |
| Jawa Timur | 34.8 | 37.5 |
| Jawa Tengah | 31.2 | 32.4 |
| Sumatera Utara | 11.6 | 13.0 |
| Banten | 8.1 | 10.6 |
| Indonesia | 206.3 | 237.6 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2010 masih terpusat di Pulau Jawa dengan jumlah populasi tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 43.1 juta jiwa. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur sebesar 37.8 juta jiwa, Jawa Tengah sebesar 32.4 juta jiwa, dan Banten dengan jumlah populasi sebesar 10.6 juta jiwa. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama penduduk melakukan migrasi ke Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa ada Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi sebesar 13 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang timpang antar daerah merupakan gambaran bahwa masih terdapat pembangunan yang belum merata. Modal utama dari pembangunan wilayah adalah penduduk. Sebab pengambilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Migrasi seumur hidup mencerminkan keadaan perpindahan yang terjadi sejak lama. Seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika provinsi tempat lahir berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang atau tempat tinggalnya saat pencacahan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun

2015 adalah 254,9 juta jiwa sedangkan migran masuk seumur hidup sebesar 27,08 juta jiwa sehingga presentase jumlah migran masuk seumur hidup dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 10,6 persen. Tujuan migrasi seumur hidup dengan jumlah migran terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 4,96 juta jiwa. Tabel 1.2 menyajikan lima provinsi dengan jumlah migran masuk terbesar.

Tabel 1.2.
Jumlah Migran Masuk Seumur Hidup di Lima Provinsi, 2015

| Provinsi | Migrasi Masuk (orang) |
|-------------|-----------------------|
| Jawa Barat | 4961541 |
| DKI Jakarta | 3647328 |
| Banten | 2491589 |
| Riau | 1881079 |
| Lampung | 1362387 |

Sumber : Badan Pusat Statistik 2015

Jumlah migrasi masuk seumur hidup terbesar adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Lampung. Kelima daerah tersebut memiliki tingkat perekonomian yang tinggi sehingga menjadi faktor utama yang menentukan migran untuk menentukan wilayah yang akan di tempati. Jawa Barat menjadi urutan yang pertama dengan jumlah migran masuk yaitu sebesar 4,96 juta jiwa. Diikuti oleh DKI Jakarta dengan jumlah migran 3,64 juta jiwa, kemudian Banten dengan jumlah migran 2,49 juta jiwa. Tiga provinsi tersebut terdapat di Pulau Jawa yang menjadi titik pertumbuhan ekonomi daerah disamping didukung oleh faktor lain seperti tingginya tingkat pendidikan, faktor sosial, maupun faktor politik.

Demikian halnya dengan wilayah di luar Pulau Jawa, terdapat dua provinsi yang menjadi tujuan migran yaitu Riau dengan jumlah migran

sebesar 1,88 juta jiwa dan Lampung dengan jumlah migran sebesar 1,36 juta jiwa. Tingginya jumlah migran di provinsi tersebut disamping didorong oleh adanya faktor ekonomi yang maju tetapi juga akibat dari program pemerintah yaitu transmigrasi dari pulau Jawa khususnya ke Provinsi Lampung dimana saat itu karena jumlah penduduk yang masih sedikit dibandingkan dengan di Jawa.

Migrasi penduduk sangat didorong oleh keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sebab tempat dimana tinggal sebelumnya belum mampu memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perpindahan tersebut baik dari aspek ekonomi, pendidikan, ataupun fasilitas lain yang lebih memadai.

Islam memandang fenomena migrasi sebagai suatu yang diharuskan ketika terjadi hal-hal yang darurat. Istilah migrasi dalam Islam dikenal dengan hijrah. Menurut Ibn Taimiyah, Ibn Hajar al-Asqalani serta Ibn Arabi diketahui bahwa hijrah berarti perpindahan dari negeri kafir atau negeri yang dalam keadaan darurat (Dar al-Kufr Wa al- Harb) menuju negeri muslim (Dar al-Islam). Ada pun maksud dari negeri kafir atau Dar Al Kufr adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh kaum kafir dan hukum-hukum yang berlaku pada negeri tersebut berdasarkan hukum kaum kafir. Pada masalah ini, negeri kafir terbagi menjadi dua yakni negeri yang memerangi kaum Muslim dan negeri yang melindungi kaum Muslim. Sedangkan negeri Islam atau Dar Al Islam adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Islam serta hukum yang berlaku berdasarkan hukum Islam meskipun penduduknya mayoritas non

Muslim. Lalu menurut Ibn Arabi pengertian hijrah diperluas menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Meninggalkan negeri yang dalam kondisi perang (Dar Al Harb) menuju negeri Islam (Dar Al Islam).
2. Meninggalkan negeri yang mayoritas penduduknya ahli bidah.
3. Menyingkir dari negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram.
4. Melarikan diri demi keselamatan jiwa.
5. Pindah dari negeri yang sedang terjangkit wabah penyakit menuju negeri yang sehat.
6. Melarikan diri untuk menyelamatkan harta benda.

Selain pada enam pendapat di atas, terkadang hijrah pun dimaknai dengan perjalanan untuk mencari pelajaran, hikmah dan nasihat. Allah SWT berfirman

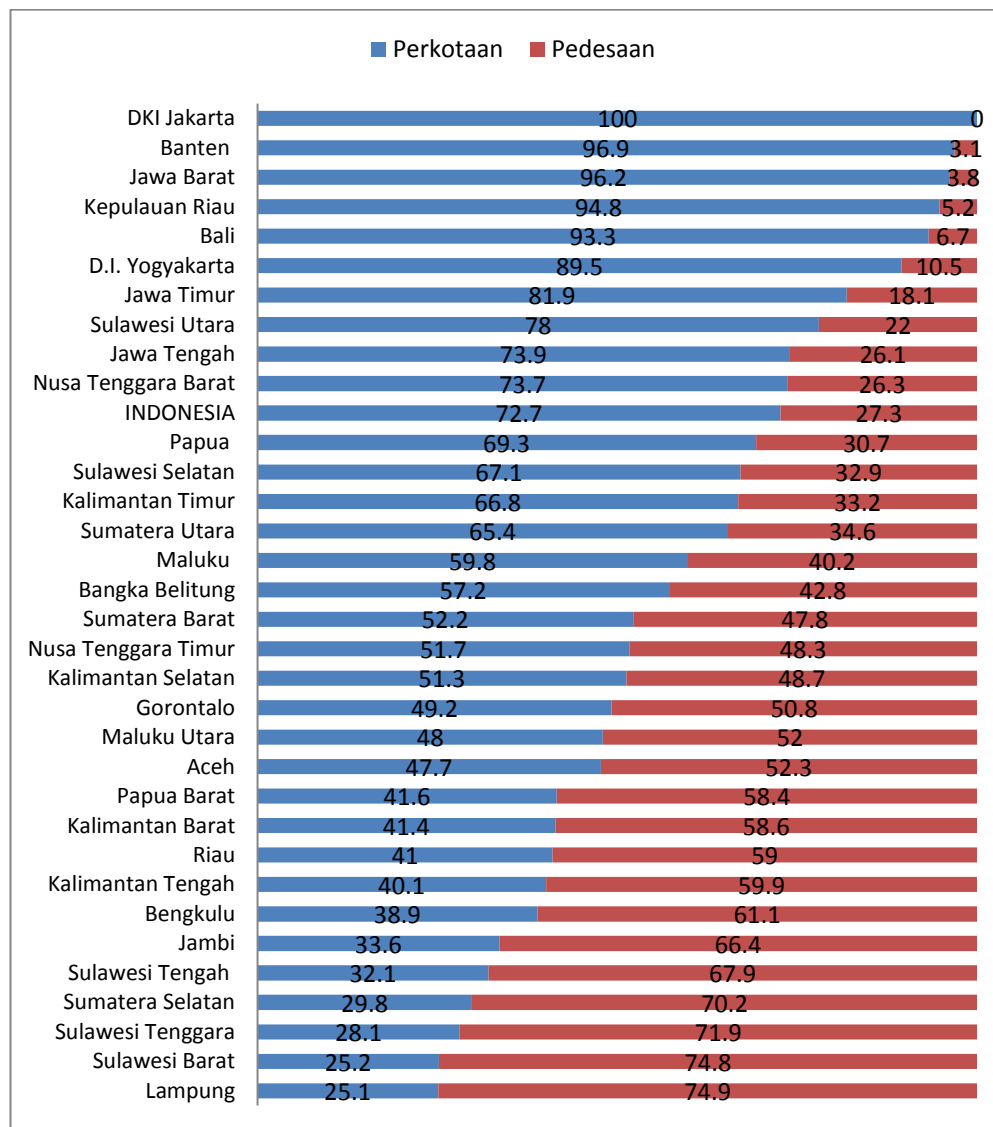
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

Artinya:

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (QS.An-Nisa’: 100)

Pelajaran yang dapat diambil melalui ayat tersebut adanya perintah Allah SWT untuk melakukan hijrah dan tidak berdiam diri sebab rezeki Allah tersebar di seluruh muka bumi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia dimana migrasi sering menjadi tujuan untuk mengatasi ketimpangan antar daerah di Indonesia.

Ketimpangan masih menjadi persoalan besar dalam mencapai tujuan pembangunan negara. Perbedaan yang sangat terlihat terjadi antara pedesaan dengan perkotaan. Migran yang berada di kota memiliki presentase lebih besar dibandingkan dengan yang berada di desa yaitu 72,7 persen untuk daerah perkotaan dan 26,3 persen untuk daerah desa.



Sumber : Sensus Penduduk 2010

Gambar 1.2.
Presentase Migran Seumur Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2010

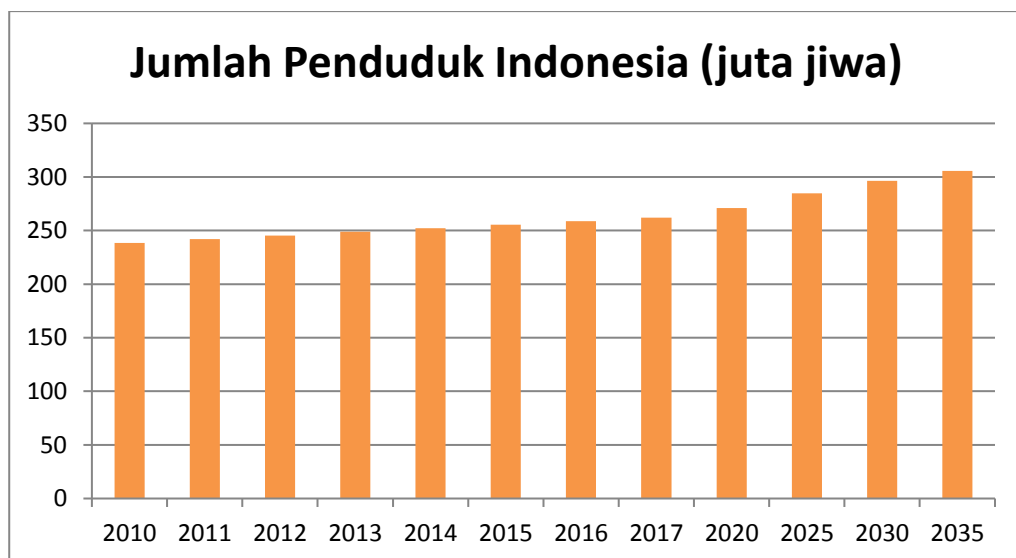
Gambar 1.2 menyajikan presentase migran seumur hidup menurut daerah tempat tinggal. Pada gambar menunjukkan provinsi yang memiliki presentase migran terbesar untuk daerah perkotaan adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hal tersebut memang terjadi akibat upaya urbanisasi yang telah dilakukan di masing-masing provinsi tersebut dimana para migran akan berpindah ke daerah perkotaan karena memiliki fasilitas yang lebih menunjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, untuk provinsi DKI Jakarta dalam hal ini tidak dibandingkan karena seluruh wilayah DKI Jakarta merupakan daerah perkotaan.

Sementara itu untuk presentase migran terbesar untuk daerah pedesaan terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Lampung. Hal tersebut terjadi karena proporsi di tiga daerah tersebut desa lebih luas dibandingkan dengan kota. Pada Provinsi Lampung bukan hanya terjadi karena faktor tersebut tetapi juga karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu tentang program transmigrasi dari Pulau Jawa. Sebab laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang sudah sangat tinggi

Menurut Guntoro (2016) program transmigrasi pada awal perkembangannya dapat dicirikan sebagai upaya langsung dalam mengarahkan mobilitas dan distribusi penduduk. Transmigrasi menjadi salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Sejalan dengan perkembangan waktu, dan perubahan. Program transmigrasi saat ini mulai dikaitkan dengan pembangunan daerah dan

pembangunan wilayah. Kondisi ini merupakan inti dari pendekatan secara tidak langsung dalam upaya pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk

Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan setiap tahun akan selalu mengalami peningkatan. Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen



Sumber: Bappenas, Proyeksi Penduduk 2013

Gambar 1.3.
Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 305 juta. Walaupun laju

pertumbuhan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi jumlah populasi penduduk meningkat. Hal tersebut didorong karena peningkatan kualitas kesehatan, jumlah kelahiran yang terus bertambah, dan angka kematian yang rendah.

Pada periode 2020 sampai 2035 Indonesia mengalami fenomena yang dinamakan bonus demografi, dimana jumlah usia produktif jauh lebih besar dan proporsi usia jauh lebih banyak dibandingkan usia lanjut. Diperkirakan Indonesia akan memiliki jumlah usia produktif 180 juta jiwa dan usia tidak produktif sebesar 60 juta jiwa atau memiliki perbandingan 3:1 dimana usia muda lebih dominan dalam suatu negara. Fenomena tersebut juga menjadi pusat perhatian pemerintah sebab penduduk merupakan objek penting dalam pembangunan sebuah negara. Fasilitas yang belum merata disetiap wilayah akan menyebabkan jumlah migran semakin tidak terkontrol. Oleh karena itu perlu persebaran yang merata dalam memberikan fasilitas kepada penduduk baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Kontrol jumlah dan persebaran penduduk menjadi hal penting untuk pembangunan negara. Pada tahun 2025 penduduk Indonesia diproyeksikan 68 persennya adalah warga kota. Peningkatan jumlah penduduk di daerah kota salah satunya disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang lebih tinggi. Daya tarik kota sebagai tujuan migrasi dengan memberikan pendapatan yang lebih tinggi, mendorong orang untuk meninggalkan daerah asalnya. Pada tabel 1.3 menyajikan garis kemiskinan Indonesia dimana menunjukkan perbedaan pendapatan perkapita antara desa dan kota yang diperoleh setiap bulannya.

Tabel 1.3.
Garis Kemiskinan Indonesia Tahun 2018 (rupiah/kapita/bulan)

| Tahun | Perkotaan | Pedesaan |
|-------|-----------|----------|
| 2013 | 275779 | 275779 |
| 2014 | 326853 | 296681 |
| 2015 | 356378 | 333034 |
| 2016 | 372114 | 350420 |
| 2017 | 400995 | 370910 |
| 2018 | 425770 | 392154 |

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Pada data terakhir tahun 2018 pendapatan perkapita di kota sebesar Rp.425.770 jauh lebih besar dibandingkan di desa yang besarnya Rp.392.154. Hal tersebut terjadi karena di perkotaan memiliki faktor-faktor penunjang seperti sumber daya manusia yang lebih baik dan sumber daya fisik baik itu mesin, gedung, dan uang. Faktor tersebut menyebabkan ketidakmerataan pendapatan antara kota dan desa.

Menurut Everett S. Lee (Mantra, 2015), perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain sering didorong oleh faktor individu seperti jenis kelamin, status pernikahan, dan tingkat pendidikan. Selain itu terdapat faktor pendorong dari daerah asal seperti pendapatan rendah, tidak tersedia lapangan pekerjaan, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan mengenai faktor-faktor yang mendorong orang bermigrasi dan pentingnya menjaga mobilitas penduduk maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS DETERMINAN KEPUTUSAN INDIVIDU MELAKUKAN MIGRASI DI INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat perkembangan mengenai mobilitas penduduk seumur hidup atau migrasi sangatlah luas, maka pada penelitian ini perlu adanya batasan-batasan yang menjadi fokus pengkajian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penduduk untuk melakukan migrasi. Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Migrasi

Penelitian ini menganalisis keputusan penduduk melakukan migrasi dengan menggunakan data sekunder Indonesia Family Life Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) tahun 2014.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Melakukan Migrasi

a. Faktor Individu

1. Jenis kelamin
2. Status pernikahan
3. Tingkat Pendidikan

b. Faktor Pendorong

1. Pendapatan
2. Status Pekerjaan
3. Status Tempat Tinggal
4. Kepemilikan Lahan Pertanian
5. Status Kemiskinan
6. Kualitas Kesehatan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan teori tersebut peneliti membagi dua faktor yaitu faktor individu serta faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi orang untuk melakukan migrasi di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh faktor individu yakni jenis kelamin, status pernikahan, dan tingkat pendidikan terhadap keputusan individu untuk melakukan migrasi.
2. Bagaimana pengaruh faktor pendorong yakni pendapatan, status pekerjaan, status tempat tinggal, kepemilikan lahan pertanian, status kemiskinan, dan kualitas kesehatan terhadap keputusan individu untuk melakukan migrasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor individu yakni jenis kelamin, status pernikahan, dan tingkat pendidikan terhadap keputusan individu untuk melakukan migrasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendorong yakni pendapatan, status pekerjaan, status tempat tinggal, kepemilikan lahan pertanian, status kemiskinan, dan kualitas kesehatan terhadap keputusan individu untuk melakukan migrasi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari agar dapat dimanfaatkan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan migrasi di Indonesia.
2. Bagi pembaca, sebagai referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan migrasi dan melengkapi penelitian sebelumnya.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas kebijakan pengendalian mobilitas penduduk yang ditetapkan pemerintah untuk menciptakan pemerataan dengan memenuhi faktor-faktor penunjang.